

Seri Promosi Investasi

PELUANG DAN POTENSI INVESTASI SAPI POTONG



**PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI
DEPARTEMEN PERTANIAN
2007**



636
PUS
P

DAFTAR ISI

440.646, 22cm

fa

Halaman :

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
I. PENDAHULUAN.....	3-4
II. PERKEMBANGAN SAPI POTONG.....	5-8
III. POTENSI PRODUKSI.....	9-12
IV. ^{Supela} POTENSI PASAR/KONSUMSI.....	13-15 ✓
V. PELUANG PENGEMBANGAN.....	16-18 ✓
VI. ANALISA EKONOMI KELAYAKAN INVESTASI.....	19-22
VII. SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN INVESTASI.....	23-40
VIII. PETA POTENSI PRODUKSI DAN KONSUMSI.....	41-42
IX. PENUTUP.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44



176

Kata Pengantar

Dalam rangka meningkatkan peran peternakan terhadap pembangunan ekonomi di subsektor peternakan pusat dan daerah diharapkan Departemen Pertanian terus berupaya memfasilitasi peran serta masyarakat selaku pelaku bisnis untuk bekerjasama dan saling menunjang dalam pengembangan sistem usaha agribisnis berbasis peternakan yang lebih komprehensif dan integrative dari hulu hingga hilir.

Pembangunan peternakan sebagai bagian integral dan pembangunan pertanian menjadi prioritas utama pembangunan daerah yang memiliki peranan kontribusi cukup besar terhadap kegiatan pembangunan ekonomi Indonesia baik dalam kapasitas sebagai sumber pangan masyarakat maupun sebagai lapangan kerja untuk berusaha serta sumber pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan agribisnis berbasis peternakan di daerah kini sudah mulai terlihat hasilnya antara lain tumbuhnya sentra-sentra produksi ternak kapasitas besar dan permanen, diversifikasi usaha, export komoditas ternak ke manca negara, prosesing daging juga unit-unit pengolahan serta meningkatnya akses peternak terhadap usaha agribisnis.

Penerbitan buku potensi dan peluang investasi sapi potong ini merupakan salah satu upaya memberikan informasi terinci mengenai potensi dan peluang pengembangan agribisnis berbasis peternakan di daerah-daerah. Semoga, bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka menjalin kerjasama, kemitraan juga melakukan investasi usaha agribisnis berbasis peternakan di Indonesia.

Melalui kesempatan ini kami menyambut baik kehadiran para calon investor mitra usaha dengan pusat dan daerah. Betapa banyak peluang dan pilihan usaha agribisnis di bidang peternakan. Kami akan terus memberikan kemudahan dan dukungan atas pilihan investasi di bidang peternakan. Semoga kita semua dapat mewujudkan usaha agribisnis peternakan yang maju.

Jakarta, Maret 2007
Pusat Perzinan dan Investasi



BAB. I

PENDAHULUAN

Pembangunan subsektor peternakan dan Industri Sapi potong diarahkan untuk meningkatkan produksi yang akhirnya menuju tercapainya sektor peternakan yang maju dan efisien. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan sumberdaya manusia, kelembagaan yang unggul serta semakin terkaitnya aktifitas antar sektor industri, perdagangan, jasa dan sektor lainnya sehingga terbentuknya jaringan kegiatan agribisnis dan agroindustri yang produktif dan berkesinambungan.

Salah satu peluang investasi sub sektor peternakan terutama dalam mengembangkan sapi perah dimasa sekarang dan yang akan datang adalah pemeliharaan ternak sapi potong. Hal ini mengingat permintaan pasar setiap tahunnya semakin meningkat, seiring dengan pertumbuhannya penduduk dan tingginya kesadaran masyarakat akan gizi. Oleh karena itu upaya meningkatkan daya saing produk ternak sapi potong harus dilakukan secara simultan dengan mewujudkan harmonisasi kebijakan yang bersifat lintas Departemen.

Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor internal seperti menerapkan efisiensi usaha, meningkatkan kualitas produk, menjamin kontinuitas suplai dan sesuai dengan permintaan pasar. Terwujudnya industri ternak sapi potong yang berdaya saing didirikan oleh petani tidak-tergantungan terhadap komponen bahan baku impor dan terjadinya transformasi dan skala usaha yang subsistem ke skala menengah maupun skala besar.

Perkembangan sub sektor peternakan khususnya ternak sapi potong sudah berkembang dengan baik. Perkembangan ini sejalan dengan program *Swasembada Daging 2007* yang telah dicauangkan secara nasional dengan sasaran penurunan impor sapi sebesar 100.000 ekor selama kurun waktu 2000-2005. Kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mendukung program tersebut adalah peningkatan produktivitas sapi potong.



Permasalahan pembangunan subsektor peternakan dapat dilihat dari aspek teknis dan aspek ekonomis. Permasalahan dari aspek teknis terutama dilihat dari relatif rendahnya produktivitas ternak.

Sedangkan permasalahan dari aspek ekonomis dilihat dari keuntungan atas nilai tambah yang dapat diperoleh masih belum memadai. Hal ini dikarenakan peternak belum mampu menyediakan modal yang cukup untuk usaha peternakan yang efisien. Dari hasil survey Analisis Pengembangan Komoditas Unggulan Subsektor Peternakan menunjukkan bahwa sapi potong masih sangat dipengaruhi oleh jenis bibit yang diusahakan bantuan modal Pemerintah, modal usaha dan status usaha dengan tingkat korelasi yang kecil (dari $r^2 = 0,165$ s/d $0,287$).

Berdasarkan peninjauan di atas maka untuk mendukung program Nasional Swasembada Daging serta pengembangan ekonomi pedesaan berarti terbuka kesempatan bagi investor untuk membuat mitra kerja. Petani sebagai plasma dan perusahaan sebagai inisiator diharapkan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk menunjang upaya ini diperlukan dukungan modal bagi usaha usaha di bidang investasi Ternak Sapi Potong

menyediakan modal bagi usaha usaha di bidang investasi



BAB II.

PERKEMBANGAN SAPI POTONG

Usaha ternak sapi potong akhir-akhir ini semakin berkembang . Hal ini ditander dengan semakin banyaknya peternak-peternak daerah yang mengusahakan sapi potong. Dewasa ini usaha ternak sapi potong sudah menyebar ke beberapa daerah di luar Jawa, seperti Lampung, Sulawesi Selatan dan Aceh.

Usaha Ternak sapi potong dapat dilakukan secara perseorangan maupun secara perusahaan dalam skala usaha besar. Namun, ada pula yang mengusahakan ternak sapi potong secara kelompok dalam kandang yang berkelompok pula.

Pengembangan usaha ternak sapi potong didorong oleh permintaan daging yang terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun dan timbulnya keinginan sebagian besar peternak sapi untuk menjual sapi-sapinya dengan harga yang lebih pantas. Pengembangan usaha ternak sapi potong sapi juga tidak terlepas dari upaya pemerintah yang telah menyebarkan kredit penggemukan sapi di beberapa daerah di Indonesia beberapa tahun yang lalu.

Diperkirakan permintaan akan daging sapi dalam 5 tahun mendatang akan mencapai 499.000 ton pada tahun 2005, atau meningkat rata-rata 5,99% per tahun dibanding tahun 1999 sebesar 367.000 ton. Apabila jumlah pemotongan ternak lokal dipertahankan sama dengan memberikan kontribusi sebesar 335,3 ribu ton daging tahun 2005. Mempertahankan jumlah pemotongan seperti sekarang berarti masih terdapat betina produktif yang dipotong sebesar 160 ribu ekor atau setara dengan 36,5 ribu ton daging. Dengan demikian masalahnya bagaimana mengurangi kesenjangan antara penyediaan dan permintaan daging sapi lima tahun mendatang yang bergerak dari 75,2 ribu ton tahun 2000, meningkat menjadi 200,2 ribu ton tahun 2005, atau setara dengan 390,6 ribu ekor dan 1.040 ekor sapi lokal tambahan yang harus dipotong setiap tahun.



Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah akan melakukan terobosan-terobosan melalui Program Swasembada Daging Tahun 2007 secara terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Program tersebut dilakukan dengan tiga langkah pokok operasional yaitu :

- 1). Meningkatkan populasi ternak sapi potong
- 2). Meningkatkan produktivitas ternak per satuan ekor.
- 3). Mengusahakan substitusi daging sapi dengan daging ternak lainnya.

Upaya mewujudkan tercapainya Swasembada Daging Tahun 2007, perlu dukungan dari semua pihak berkecimpung terutama seluruh aparat pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta yang bergerak di bidang peternakan (Investor) dan seluruh petani ternak sebagai pelaksana terdepan di pedesaan.

Dalam rangka mempersiapkan pelaksana dilapangan dirasa perlu diterbitkan suatu *Buku Potensi dan Peluang Investasi Ternak Sapi Potong*, dengan harapan dapat memberikan informasi di bidang ternak sapi potong.

Sapi yang dijual para peternak pada umumnya berupa sapi-sapi sudah tua dan sudah tidak efektif lagi bila digunakan sebagai tenaga kerja. Sapi-sapi demikian sudah barang tentu kondisinya relatif kurus dan tidak dapat diharapkan untuk menghasilkan daging yang berkualitas baik dan kalau dijual pun harganya relatif murah. Para peternak sapi umumnya menjual sapi-sapinya kepada pedagang-pedagang ternak dengan harga yang didasarkan pada kondisi dan bobot badan. Oleh karena selama ini para peternak merasa harga yang mereka terima terlalu murah, timbulah hasrat mereka untuk mengupayakan harga penjualan sapi yang lebih mahal dengan penggemukannya terlebih dahulu selama beberapa bulan sebelum dijual ke pasar ataupun kepada pedagang ternak dimana ternak sapi potong ternyata mendatangkan nilai tambah bagi para peternak.

Usaha ternak sapi potong mendatangkan keuntungan ganda berupa keuntungan dari bertambahnya bobot badan dan kotoran sapi menjadi pupuk kandang. Jumlah keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan sapi yang digemukkan tergantung pada pertambahan bobot badan yang dicapai dalam proses penggemukan, lama penggemukan, dan harga daging.



Dalam usaha ternak sapi potong selain dapat meningkatkan harga penjualan sapi, harga pupuk kandang pun dapat lebih ditingkatkan. Artinya, pupuk kandang yang diproduksi pada waktu penggemukan itu dapat lebih ditingkatkan nilai ekonomisnya. Selama ini para peternak yang mengusahakan penggemukan sapi, menjual ataupun menggunakan sendiri pupuk kandang itu tanpa melalui proses terlebih dahulu. Oleh karena itu, harganya relatif murah dan kualitasnya belum begitu baik untuk digunakan sebagai pupuk kandang. Teknis untuk memproses pupuk kandang menjadi kompos badan hanya sekedar meningkatkan kualitasnya sehingga harganya akan lebih mahal, tetapi juga sebagai langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Pada waktu ternak sapi potong, kotoran sapi berupa pupuk kandang akan relatif banyak dihasilkan. Jumlah pupuk kandang yang dihasilkan oleh setiap ekor sapi terutama tergantung pada jumlah dekan atau ransum yang dikonsumsi. Hasil observasi Dinas Peternakan daerah Tingkat I Jawa Timur, misalnya, memperoleh data bahwa pemerahan hijauan segar pada sapi potong rata-rata 28,5 kg/hari akan diperoleh pupuk kandang sebanyak 18,0 kg/hari. Apabila seorang peternak, misalnya, memelihara atau menggemukan 4 ekor sapi selama 4 bulan maka akan diperoleh pupuk kandang 8.640 kg. Pupuk kandang sebanyak itu apabila dibiarkan menumpuk disekitar kandang lama-lama bukan saja tidak memenuhi persyaratan kebersihan kandang lagi, tetapi sudah mengganggu keserasian lingkungan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bahwa usaha ternak sapi potong sebaiknya dilengkapi dengan pembuatan kompos.

Alternatif dapat dianjurkan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari kotoran sapi yang dihasilkan pada waktu usaha ternak sapi potong adalah penggunaan teknologi biogas. Teknologi ini merupakan proses fermentasi dan kotoran ternak dalam suatu pak ataupun lubang sehingga menghasilkan gas metana. Gas ini dapat dipakai untuk pemanrengan dan memasak, sedangkan kotoran ternak setelah mengalami proses fermentasi akan menjadi pupuk kandang yang berkualitas tinggi.



BAB. III

POTENSI PRODUKSI

Produksi ternak sapi potong

Sapi-sapi lokal yang terdapat di Indonesia, kesemuanya dapat dipergunakan untuk usaha ternak sapi potong. Akan tetapi tidaklah semua jenis sapi mempunyai prospek yang sama. Ada beberapa indikator dapat digunakan untuk menentukan jenis sapi yang lebih prospektif dimana indikator-indikator tersebut adalah:

- 1) Jumlah populasi,
- 2) Jumlah pertambahan populasi setiap tahun.
- 3) penyebaran,
- 4) produksi karkas, dan
- 5) efisiensi penggunaan pakan.

Jumlah populasi

Pada dasarnya semakin tinggi populasi suatu jenis ternak akan semakin mudah mendapatkan jenis ternak tersebut. Populasi sapi potong di Indonesia pada tahun 1993 adalah sebanyak 11.355.676 ekor (statistik Peternakan, 1994). Namun jumlah populasi setiap jenis sapi potong itu sulit diketahui karena belum terdapat data yang akurat. Sebagai perkiraan dapat dipergunakan data tahun 1988 yang menunjukkan komposisi jenis sapi potong di Indonesia, masing-masing adalah sapi ongole atau sumba ongole 2,6%, sapi peranakan ongole (PO) 1,2%, sapi ball 26,9%, sapi madura 11,6%, dan lain-lain atau sapi campuran 50,7% .

Berdasarkan jumlah populasi sapi potong dan komposisinya, dinyatakan bahwa jumlah populasi setiap jenis sapi potong di Indonesia diperkirakan sebagai berikut pada tabel



TABEL 1: PERKIRAAN JUMLAH POPULASI SETIAP JENIS SAPI POTONG

Sapi ongole	2,6	295.253
Sapi bali	26,9	3.054.731
Sapi madura	11,6	1.317.282
Sapi peranakan ongole	8,2	931.182
Sapi Campuran	50,7	5.757.429

Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan

Dari tabel diatas terlihat bahwa sapi campuran merupakan populasi yang terkanyak erudian disusul oleh sapi bali. Dengan demikian, berdasarkan indikator jumlah populasi, sapi campuran dan sapi bali lebih prospektif bila digunakan sebagai bakalan dalam usaha ternak sapi potong.

Sapi campuran adalah jenis sapi yang merupakan hasil persilangan atau perkawinan dsengaja ataupun tidak dsengaja antara sapi-sapi lokal dengan sapi-sapi Impor. Sapi campuran kemungkinan juga merupakan hasil persilang antara sapi-sapi lokal sendiri. Sebagaimana diketahui, akhir tahun tujuh puluhan dan tahun delapan puluhan banyak jenis sapi-sapi dari luar negeri ka Indonesia. Sapi Impor ini banyak dikawinkan dengan sapi lokal dan menghasilkan sapi campuran karena jenis sapi ini banyak macamnya dan *performance* ataupun penyebarannya botum banyak diteliti maka penilaian terhadap jenis sapi campuran ini cukup ulit. Oleh karena itulah, jenis sapi campuran lai walaupun banyak populasinya, adak dilibatkan dalam pemilihan jenis sapi yang luhih prospektif.

Populasi yang banyak dari jenis sapi campuran bukan terdiri dari jenis satu sapi saja, tetapi terdiri dan beberapa jenis sapi. Sapi Aceh juga tidak dilibatkan dalam penilaian karena populasinya masih yangat terbatas. Dengan demikian dilihat dari Indikator jumlah populasi, sapi bali lebih prospektif untuk digunakan sebagai bakalan dalam usaha penggemukan.



Pertambahan populasi setiap tahun

Pertambahan populasi setiap tahun merupakan penjabaran dari kelahiran dan kematian yang terjadi setiap tahun. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diperkirakan bertambah populasi setiap jenis sapi lokal pada tabel 2 sebagai berikut.

TABEL 2 : PERTAMBAHAN POPULASI SETIAP JENIS SAPI POTONG

Jenis Sapi	Perkiraan Pertambahan Populasi (%)	Indikator	Populasi (ekor)
Sapi PO	12,7	0,40	117.787
Sapi Bali	20,9	2,47	623.116
Sapi Madura	8,7	1,22	113.206
Sapi Ongole	9,1	1,30	26.519

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan

Perkiraan pertambahan populasi setiap jenis sapi yang terjadi sebagaimana yang tertera pada Tabel 2 adalah sebagai gambaran kuantitatif dari setiap jenis sapi lokal yang bertambah setiap tahun. Dari tabel 2 tersebut ternyata bahwa pertambahan populasi yang paling banyak setiap tahun adalah jenis sapi Bali. Oleh karena itu, nilai indikator pertambahan populasi setiap tahun, sapi Bali merupakan jenis sapi lokal yang lebih prospektif untuk digunakan sebagai pakan usaha ternak sapi potong.

Penyebaran

Walaupun populasi suatu jenis sapi termasuk tinggi, tetapi kalau tidak tersebar secara merata pada berbagai daerah maka sulit mendapatkan sapi tersebut, terutama pada daerah-daerah yang jauh dari lokasi penyebarannya. Oleh karena itu, indikator penyebaran perlu dimasukkan dalam penentuan tingkat prospektivitas suatu jenis sapi untuk digunakan sebagai pakan dalam usaha ternak sapi potong.

Sapi PO terutama terdapat hampir di seluruh daerah Pulau Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Sapi Bali telah tersebar hampir seluruh Indonesia dengan konsentrasi penyebaran terutama di Pulau Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara



Timur, Sumbawa, dan Lampung. Kelestariannya, sapi Bali dewasa ini lebih menyebar dari pada sapi PO. Jenis sapi lokal lainnya seperti sapi Madura, Ongole, dan sapi Aceh, tersebar hanya pada daerah-daerah tertentu saja. Dengan demikian, dilihat dari indikator penyebaran ini, sapi Bali dan sapi PO adalah lebih prospektif untuk dijadikan sebagai bakalan dalam usaha penggemukan.



BAB IV

POTENSI PASAR/KONSUMSI

A. Usaha – usaha agar Peternak memperoleh harga jual ternak yang tinggi di pasar

Pada umumnya pasar usaha ternak sapi potong di Indonesia tidak sepenuhnya ditujukan untuk memperbaiki kualitas dagingnya, tetapi juga untuk tujuan memperoleh tenaga ternak pupuk serta kulit (industri benyamakan). Dalam usaha peternakan seperti ini yang perlu diperhatikan pada saat peternak panen, adalah menjaga kondisi ternak agar tidak terjadi penyusutan bobot badan sebelum dijual sehingga peternak usaha sapi potong memperoleh harga yang memadai.

Upaya pengurangan penyusutan bobot badan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Sebelum ternak dijual

1). Pakan ternak

Pada bulan terakhir sebelum ternak dijual, pemberian pakan supaya diperhatikan secara khusus agar mendapatkan pertambahan berat badan dan daging yang berkualitas.

2). Perawatan/pengobatan ternak

Ternak-ternak yang terserang penyakit-penyakit supaya segera diobati sampai tuntas, sampai ternak betul-betul dalam keadaan sehat.

3). Tenaga kerja ternak

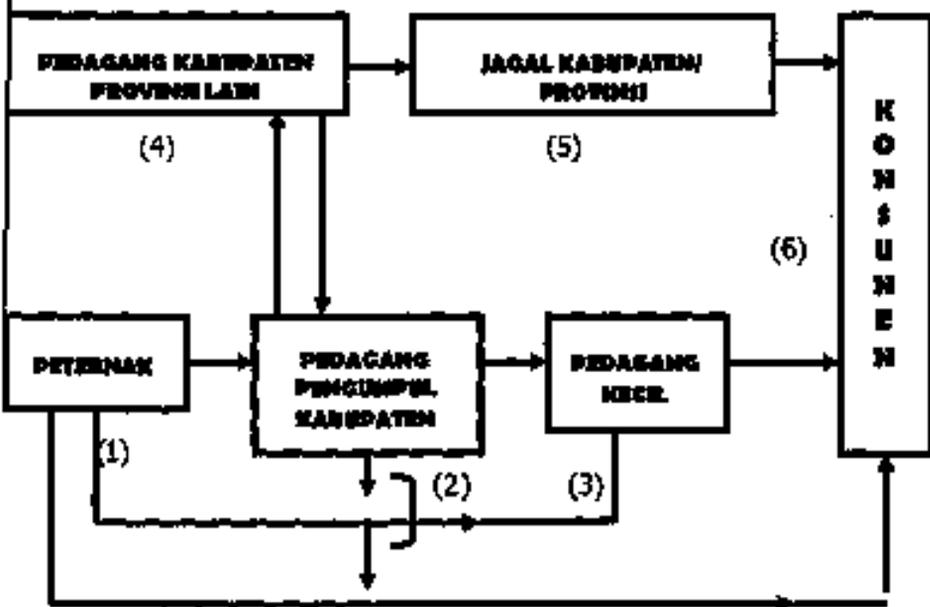
Adalah upaya mengurangi penggunaan ternak sebagai tenaga kerja pada bulan terakhir sebelum ternak dijual, sehingga tidak terjadi penurunan bobot badan.



Pengangkutan

- (1). Pengangkutan sapi potong dengan truk supaya diben atas lorami padi setebal 10 cm dan diberi sekat/pemisah dari bambu yang cukup kuat, untuk menghindari ternak dari luka atau ternaselet/kerusakan fisik.
- (2). Kapasitas muatan supaya disesuaikan dengan luas bak truk.

Pasar sapi potong di daerah



GAMBAR 1 : ALUR EKONOMI PERDAGANGAN TERNAK SAPI POTONG

Alur ekonomi perdagangan ternak di daerah mempunyai 4 jalur, jalur I : (1) - (6) jalur terpendek, yaitu jalur peternak - konsumen. Jalur ini paling sedikit, asal ternak setempat, digunakan untuk konsumen setempat, misalnya konsumen beli ternak betangga untuk hajatan. Jalur ini paling sedikit atau dapat melewati (2), jalur II: (1) - (2) - (3) - (6), yaitu produsen - pedagang pengumpul - jagal - konsumen. Jalur ini sering dipendekkan tanpa melewati pelaku



j). Pejagar di Kabupaten, sering sudah berlangganan di desa tertentu untuk memperoleh mak yang akan di potong. Atau pejagar tersebut mempunyai ternak yang digaduhkan di desa. Jalur ini merupakan jalur lokal Kabupaten atau Kecamatan.



BAB V.

PELUANG PENGEMBANGAN

Pengembangan sapi potong

Melihat potensi wilayah dalam kawasan prioritas, kawasan andalan di tiap-tiap wilayah pengembangan, peluang pengembangan sapi potong tidak hanya berada dalam butir-butir yang berjudul sapi potong, namun di banyak kawasan-kawasan agroekosistem lain, dimana sapi potong dapat menunjang bagi pengembangan diversifikasi usaha berupa sampingan maupun cabang usaha. Dalam pengamatan perkembangan peternakan sapi potong, menunjukkan bahwa beberapa potensi kawasan yang, sementara ini tidak dikhususkan bagi sapi potong disamping peternakan, ternyata memberikan sumbangan konsep baru peternakan yang dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan dan meningkatkan kualitas lingkungan

- (a). Kawasan pariwisata, baik di kawasan peternakannya sendiri, posisi ternak mempunyai daya tarik di hutan taman nasional dengan sapi potong bibit Bali. Ini memerlukan pemahaman dan kemasan khusus seperti kerbau kalang di Kalimantan Selatan, kerbau kar di Taman Nasional Bakuran, baik dalam konsep pengembangannya dan pengelolannya (potensi) ini dijumpai di Nusakambangan. Dalam konsep tersebut untuk menempatkan ternak sebagai bagian paket wisata, menempatkan wilayah sebagai wilayah produksi yang produktif tanpa meninggalkan estetika dan pengendalian. Masih banyak sist lain peternakan untuk menjadi paket wisata. Hal serupa dapat dilakukan di taman nasional Karimun Jawa.
- (b). Adanya berkembang pola kawasan mini berupa anak desa untuk berbagai ternak sapi potong yang berbasis pada lahan sewa, pemanfaatan lahan terlantar, lahan sempadan sungai diberbagai tempat merupakan satu pola usaha pemanfaatan lahan sempit bagi sbeitu kebersamaan dalam mengembangkan kelompok maupun kerjasama yang merunakan pola pertumbuhan baik untuk produksi maupun



pembibitan dalam skala terbatas. Pemilik atau penguasaan lahan komunal akan mempercepat pertumbuhan pola ini, khusus dalam pemanfaatan sempadan sungai, disamping masalah teknis peternakan, teknis konservasi maupun estetikanya dan pemertapan status lahannya perlu lebih di perhatikan.

- (c). Alokasi lahan khusus, baik berupa kawasan untuk peternakan maupun kawasan komoditas lain, belum tampak dalam sistem perencanaan, perlu pemertapan yang konseptual.
- (d). Beberapa teknologi peternakan yang telah berkembang dimasyarakat pedesaan di Jawa Tengah seperti yang dijumpai dan berkembang di Boyolali sebagai daerah yang dikenal "bengkel ternak" untuk sapi perah (produksi susu, pembesaran anak sapi, kereman sapi perah, IB).

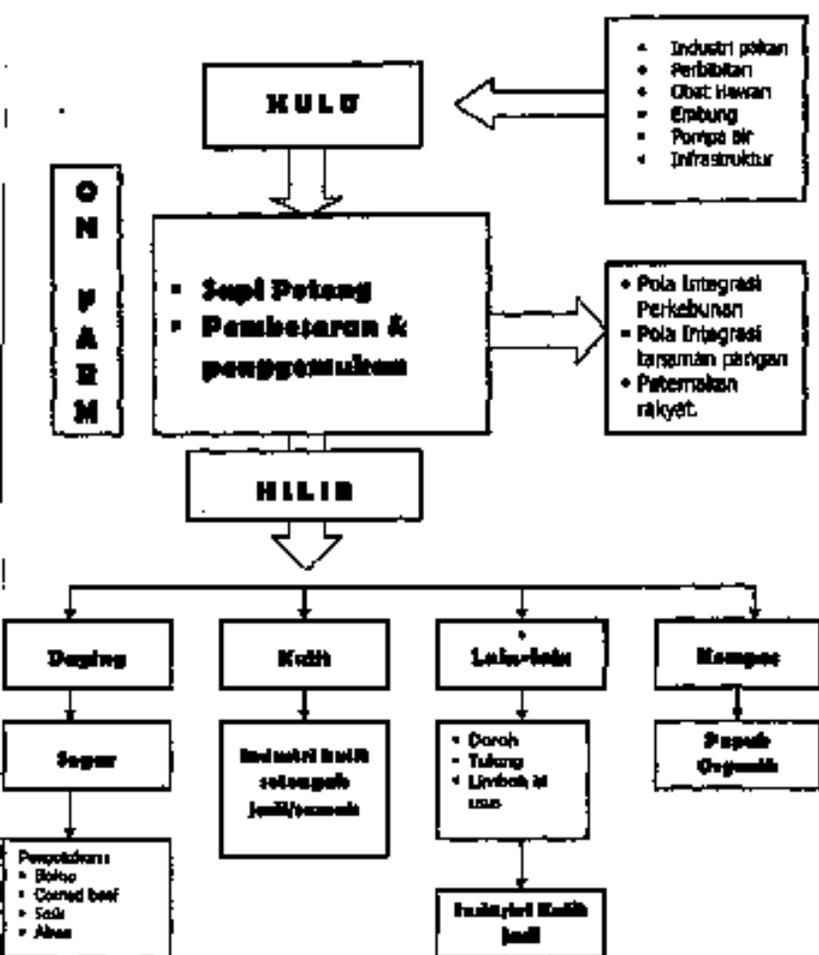
Dengan adanya perkembangan kawasan-kawasan baru, maka dalam perencanaan tata ruang yang akan datang maubun dalam menjabarkan pengembangan sapi potong akan berbeda maknanya jika para perencana dapat memahami konsep-konsep kawasan peternakan.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengembangan peternakan dalam rencana tata ruang daerah, Dinas Peternakan terkait sudah seharusnya lebih dapat berperan baik dalam menyajikan informasi berupa data dan konsep yang menunjang perencanaan maupun ikutsertaa secara aktif dalam kelembagaan penyusunan tata ruang dan pengendaliennya.

Disamping itu adanya usaha-usaha baik disektor hulu maupun hilir dari usaha ternak sapi potong tersebut dapat dilihat pada gambar pohon industri sapi potong sebagai berikut :



JAMBAR 2 : POHON INDUSTRI SAPI POTONG



BAB VI

ANALISA EKONOMI KELAYAKAN INVESTASI USAHA PETERNAKAN SAPI POTONG

Berdasarkan hasil pencatatan adalah hal yang paling penting dalam menjalankan setiap jenis usaha, termasuk usaha penggemukan sapi potong. Pencatatan baik pengeluaran maupun pendapatan, dalam jumlah besar maupun kecil harus dilabiskan dengan teliti, sehingga analisis dan penghitungan laba-rugi suatu usaha bisa dilakukan dengan hasil yang mencerminkan potensi usaha. Dalam sistem usaha peternakan yang masih bersifat tradisional, pencatatan tidak terlalu diperlukan, karena tunggal ternak hanya sebagai tabungan, yang sewaktu-waktu bisa dijual jika ada keperluan yang bersifat mendadak. Pekerjaan menyediakan pakan ternak yang dilakukan sehari oleh pemilik sapi, biasanya tidak diperhitungkan, demikian juga penggunaan tanah untuk kandang.

Dalam usaha peternakan yang berorientasi bisnis dan mengharapkan keuntungan besar, seluruh pengeluaran dan pendapatan harus diperhitungkan. Ada biaya-biaya yang secara riil tidak dikeluarkan, tetapi harus tetap diperhitungkan, misalnya gaji pemilik usaha yang turut bekerja dalam usahanya sendiri, dan beberapa biaya lain. Meskipun pemilik usaha bekerja dalam usahanya sendiri, gajinya harus diperhitungkan untuk memperoleh angka keuntungan yang sebenarnya. Demikian juga bunga bank, sekalipun modal yang digunakan adalah modal sendiri. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau menyewa lahan untuk penggemukan, peralatan atau kendaraan, pembanguan kandang, dan berbagai sarana penunjang, yang tidak habis dipakai untuk satu kali masa produksi, diperhitungkan sebagai biaya penyusutan, yang didasarkan pada umur pakainya. Misalnya biaya sewa lahan sebesar Rp.1.000.000 per tahun.

Agar perhitungan secara ekonomis dapat dilakukan secara akurat, perlu dibedakan pemisahan antara biaya investasi dan biaya produksi (variabel) yang dikeluarkan selama masa usaha. Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau menyewa barang yang tidak habis dipakai dalam satu kali masa produksi, misalnya biaya pembelian lahan usaha, pembuatan kandang, sewa kendaraan pendangkut. Biaya variabel merupakan





BAB VII

SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN INVESTASI

Konvensional, yang terdiri dari :

1. Perbankan

Salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan adalah Skim Kredit Komersial.

e. Skim Kredit Komersial Perbankan

Skim kredit komersial yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian berbeda antara bank yang satu dengan bank yang lain.

PT Bank Negara Indonesia (BNI)

(a) Kredit Usaha Kecil

(1) Penerima Kredit :

Pengusaha Kecil termasuk didalamnya pelaku usaha di sektor pertanian.

(2) Penggunaan kredit atau Jenis Usaha Yang Dibiayai:

- Kredit untuk tujuan produktif
- Untuk membiayai barang modal (modal kerja) maupun untuk keperluan investasi (membeli/membangun tool, gudang, pembelian mesin, kendaraan naga, dll)

(3) Maksimum dan jangka waktu kredit :

- Maksimum kredit Rp 350 Juta
- Besarnya kredit disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pelunasannya.
- Self financial tidak diwajibkan, kecuali untuk keperluan investasi disesuaikan dengan ketentuan Bank BNI
- Jangka waktu untuk jenis modal kerja (KMK) maksimum 1 tahun



- Untuk jenis kredit investasi (KI), jangka waktu sesuai dengan ketentuan dan jenis yang dibiayai

(4) Bunga dan propisi

- Tingkat suku bunga sesuai dengan rate/ketentuan yang berlaku di Bank BNI
- Propisi 1% pa. Eenmalig

NON KUK (Kredit Usaha Kecil)

(1) Penerima kredit:

Pengusaha menengah

(2) Penggunaan kredit :

- Kredit untuk tujuan usaha/produktif
- Untuk membiayai barang modal (modal kerja) maupun untuk keperluan investasi (membeli/membangun tool, gudang, pembelian mesin, kendaraan naga, dll)

(3) Maksimum dan jangka waktu kredit

- Maksimum kredit diatas Rp 350 juta s/d 5 Milyar
- Besarnya kredit disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pelunasan dari hasil usahanya
- Self financing tidak diwajibkan, sesuai untuk keperluan investasi disesuaikan dengan ketentuan Bank BNI
- Jangka waktu untuk jenis Modal Kerja (KMK) maksimal 1 tahun (dapat dipanjangkan)
- Untuk jenis investasi (KI), jangka waktu sesuai dengan ketentuan dan jenis investasi yang dibiayai.

(4) Bunga dan Propisi

- Tingkat bunga sesuai rate/ketentuan yang berlaku di Bank BNI
- Propisi 1% pa. Eenmalig
- Unit Layanan Mikro



(5) Kredit Mikro

Kredit mikro adalah fasilitas kredit yang keperluan produktif atau konsumtif yang diberikan kepada pengusaha kecil yang mempunyai penghasilan cukup dan dapat dipergunakan sebagai alternatif sumber pembiayaan kredit.

(6) Target Pasar

Masyarakat mikro dengan penghasilan antara Rp 25.000 s/d Rp 625.000/hari.

(7) Maksimum Kredit :

Fitur 1 : Maksimum Rp 10 juta

Fitur 2 : Maksimum Rp 25 juta

Fitur 3 s/d 5 : Maksimum Rp 50 juta

(8) Jangka waktu :

Maksimum 3 (tiga) tahun

(9) Suku bunga :

1,8 % s/d 2% pu

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

(a) **KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan)**

(1) Jenis-Jenis Kupedes :

- Kupedes Modal Kerja Sektor Pertanian
- Kupedes Investasi Sektor Pertanian

(2) Penerima Kredit

Kupedes diberikan kepada purorangan atau perusahaan yang usahanya layak untuk Kupedes, yaitu:

- Golongan Pengusaha : Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri dan Jasa
- Golongan berpenghasilan tetap : Semua Pegawai Negeri, Pensiunan, Pegawai perusahaan swasta.



(3) Jenis Usaha yang dibiayai :

Kupedes dapat membiayai semua jenis usaha seperti pertanian, perdagangan, industri, jasa dan lain-lain yang layak dan mempunyai prospek bagus dan tidak bertentangan dengan peraturan, undang-undang, kesesuaian, agama, dan lingkungan hidup.

(4) Suku Bunga :

Bunga Kupedes adalah komersial (suku bunga pasar) dihitung dari besarnya maksimum kredit mula-mula dan disebabkan sepanjang jangka waktu kredit (Flat rate system).

(b) Kredit Kecil Investasi (KKI) dan Kredit Kecil Modal Kerja (KKM) s/d Rp 350 Juta.

(1) Penerima Kredit

Penerima kredit KKI dan KKM adalah pengusaha kecil pada semua sektor usaha yang produktif.

(2) Jenis usaha yang dibiayai :

Skim Kredit KKI dan KKM dapat membiayai semua jenis usaha kecil :

- Jenis usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesesuaian
- Usaha lain yang menurut penilaian BRI tidak layak.

(3) Suku Bunga :

Suku bunga skim kredit KKI dan KKM adalah komersial

(4) Jangka waktu kredit :

Sesuai dengan musim usaha

(5) Jangka waktu maksimum :

- KKI = 5 tahun, dengan grace periode maksimum 12 bulan
- KKM s/d 50 Juta = 24 bulan
- KKM Rp 50 juta s/d Rp 350 juta = 36 bulan

(6) Kredit wajib diangsur tiap bulan, dua bulan atau tiga bulan

(7) Angsuran sesuai dengan cash flow usaha



(c) Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK)

(1) Penerima Kredit :

Skim kredit ini ditujukan untuk pembiayaan usaha yang produktif

(2) Jenis usaha yang dibiayai :

Skim KI dan KMK dapat membiayai semua jenis usaha kecuali :

- Jenis usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
- Usaha lain yang menurut penilaian BRI tidak layak.

(3) Suku bunga :

Suku bunga skim KI dan KMK adalah komersial

(4) Jangka waktu kredit :

Sesuai dengan siklus/musim usaha

(5) Jangka waktu maksimum :

- KI = 5 tahun, dengan grace periode sesuai analisa
- KMK = 36 bulan
- Angsuran pokok wajib dilangsung tiap 1-6 bulan
- Angsuran sesuai dengan cash flow usaha

(d) Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE)

(1) Penerima kredit :

Penerima kredit Modal Kerja Ekspor adalah eksportir

(2) Jenis usaha yang dibiayai

Seluruh atau sebagian kegiatan dalam rangka ekspor mulai dari kegiatan produksi barang ekspor sampai dengan negosiasi (pengambilalihan/pencarian wesel ekspor). Kegiatan produksi barang ekspor meliputi seluruh tahap proses produksi mulai pengadaan stock sampai dengan menjadi barang siap ekspor, hingga pelaksanaan ekspor.

(3) Suku Bunga :

Suku bunga skim kredit KMKE adalah komersial



PT. Bank Danamon

(a) Kredit Usaha Kecil (KUK)

(1) Besar Kredit :

- KUK Mikro : mulai dari Rp 50 juta s/d Rp 1 Milyar
- KUK Dasar : > Rp 50 juta s/d Rp 100 juta
- KUK Prima : > Rp 100 juta s/d Rp 350 juta

(2) Jenis usaha :

Diberikan kepada semua sektor ekonomi, meliputi sektor : Pertanian, Industri, Perdagangan dan Jasa dan Ekonomi lainnya.

(3) Syarat Pemberian :

KUK Mikro :

Calan debitur yang dapat dilayani :

- Individu, ada persetujuan suami-istri bagi debitur yang sudah kawin
- Badan hukum
- Kelompok usaha

Lama Usaha :

- Debitur perorangan minimum 1 (satu) tahun
- Debitur badan usaha minimum 6 (enam) bulan
- Debitur kelompok minimum 3 (tiga) bulan

Jangka Waktu Kredit :

- Modal kerja : Maksimum 1 (satu) tahun
- Investasi : Maksimum 5 (lima) tahun

(4) Suku Bunga :

Suku Bunga komersial yang berlaku di pasar

KUK Dasar

Debitur :

- Individu, ada persetujuan suami-istri bagi debitur yang sudah kawin
- Badan hukum
- Kelompok usaha



Lama Usaha :

- Debitur perorangan min 1 (satu) tahun
- Debitur badan usaha min 6 (enam) bulan
- Debitur kelompok min 3 (tiga) bulan

Jangka Waktu Kredit :

- Modal kerja : Max 1 (satu) tahun
- Investasi : Max 5 (lima) tahun

KUK Prima

Debitur :

- Individu, ada persetujuan suami-istri bagi debitur yang sudah kawin,
- Badan hukum
- Kelompok usaha

Lama usaha :

- Debitur perorangan min 1 (satu) tahun
- Debitur badan usaha min 6 (enam) bulan
- Debitur kelompok min 3 (tiga) bulan

Jangka waktu kredit :

- Modal kerja : Max 1 (satu) tahun
- Investasi : Max 5 (lima) tahun

Suku bunga :

Suku bunga komersial yang berlaku di pasar

(b) Fasilitas Two Step Loan (TSL)

(1) Jedm Ajdi (Asean Japan Development Fund)

- > Plafon kredit : Rp 100 juta – Rp 200 juta
- > Kredit debitur : Usaha produktif
- > Jangka waktu kredit : Investasi = 3-7 tahun (Grace periode: 2 tahun)
- > Bidang usaha : Non Manufacturing
- > Suku bunga : sesuai dengan kondisi pasar wilayah



(2) Jexim Japan Vi

- Plafon kredit : Rp 20 juta – Rp 350 juta
- Kredit debitur : Usaha produktif
- Jangka waktu kredit : Investasi max 8 tahun (Grace periode : 3 tahun)
- Bidang usaha : semua sektor Ekonomi
- Suku bunga : sesuai dengan kondisi pasar wilayah

(3) IBRD-AFP (Agriculture Financing Project)

- Plafon kredit : Max Rp 3,5 Milyar
- Kredit Debitur : Usaha produktif
- Jangka waktu kredit : Investasi max 8 tahun
- Bidang usaha : Sektor Pertanian, Industri hasil Pertanian, Jasa-jasa terkait dengan sektor pertanian.

(c) Kredit Program

(1) Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan menengah

Plafon kredit :

- Investasi : Max Rp 25 juta
- Modal kerja : Max Rp 5 juta
- Modal Kerja terkait Investasi : Max Rp 30 juta, dengan ketentuan modal kerja yang dapat diberikan maksimum sebesar kredit investasi yang disetujui

Kredit Debitur :

- Kekayaan Debitur max Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan)
- WNI
- Berdiri sendiri (bukan anak perusahaan)
- Bentuk usaha perorangan, tidak berbadan hukum
- Memakai teknologi sederhana
- Syarat kelompok : Jumlah anggota 5 s/d 15 orang dan masing-masing melakukan kegiatan usaha produktif, mempunyai pengurus



aktif, mempunyai aturan kelompok, bersedia membuka tabungan kelompok dan ditempatkan pada bank penyalur dan minimum mempunyai pembukuan sederhana.

Jangka waktu kredit :

- Modal kerja = 1 tahun
- Investasi = 5 tahun
- Bidang usaha : semua sektor ekonomi
- Suku bunga : 16 % p.a termasuk imbalan untuk kelompok - 1% p.a
- Jaminan :
Kelayakan usaha yang dibiayai
Surat sanggup bayar hutang dari debitur perorangan/kelompok

(2) Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya

Plafon kredit :

- Masing-masing anggota koperasi max Rp 50 juta
- Pembiayaan modal kerja di sektor perdagangan & jasa max Rp 10 juta/anggota.
- Koperasi Primer untuk diteruskan kepada anggotanya guna membiayai usaha produktif anggota koperasi.

Jangka waktu kredit :

- Modal kerja = 1 tahun
- Investasi max = 15 tahun
- Modal kerja terkait Investasi max = 5 tahun

Bidang usaha : Semua sektor ekonomi

Suku bunga : 16 % p.a

Jaminan :

- Kelayakan usaha yang dibiayai
- Surat sanggup bayar hutang dari debitur perorangan / kelompok



PT Bank Central Asia

(a) Kredit lokal (pinjaman Rekening Koran)

- (1) Penerima kredit :
Semua calon debitur yang memenuhi persyaratan BCA
- (2) Jenis usaha yang dibiayai :
Semua sektor usaha produktif
- (3) Plafon kredit :
Sesuai kebutuhan kredit calon debitur
- (4) Suku bunga kredit :
Suku bunga komersial sesuai ketentuan BCA
- (5) Jangka waktu : 1 (satu) tahun dapat diperpanjang

(b) Time Loan (Pinjaman Berjangka)

- (1) Jenis Time Loan :
Revolving
Insidental
- (2) Penerima kredit :
Semua calon debitur yang memenuhi persyaratan BCA
- (3) Jenis usaha yang dibiayai :
Semua sektor usaha produktif
- (4) Plafon kredit :
Sesuai kebutuhan kredit calon debitur
- (5) Suku bunga kredit :
Suku bunga kredit adalah suku bunga komersial sesuai ketentuan BCA
- (6) Jangka waktu
Maksimum 1 (satu) tahun dapat diperpanjang. Khususnya untuk Time Loan Insidental, jangka waktu maksimum 6 bulan, tidak dapat diperpanjang.



(c) **Installment Loan (Pinjaman angsuran)**

- (1) **Penerima kredit :**
Semua calon debitur yang memenuhi persyaratan BCA
- (2) **Jenis usaha yang dibiayai :**
Semua sektor usaha produktif
- (3) **Plafon kredit**
Sesuai kebutuhan kredit calon debitur
- (4) **Suku bunga kredit :**
Suku bunga komersial sesuai ketentuan BCA
- (5) **Jangka waktu:**
Max : 3 tahun

(d) **Kredit Ekspor**

- o **Penerima kredit :**
Semua calon debitur yang memenuhi persyaratan BCA
- o **Jenis usaha yang dibiayai :**
Semua sektor usaha produktif
- o **Plafon Kredit :**
Sesuai kebutuhan calon kredit debitur
- o **Suku bunga kredit :**
Suku bunga kredit komersial sesuai ketentuan BCA
- o **Jangka waktu :**
Max 1 tahun, dapat diperpanjang

(e) **Kredit Impor**

- o **Penerima kredit :**
Nasabah/debitur BCA yang membuka Sight L/C melalui BCA
- o **Jenis usaha yang dibiayai :**
Semua sektor usaha produktif
- o **Plafon kredit :**
Sesuai kebutuhan calon kredit debitur



- o Suku bunga kredit
Suku bunga kredit komersial sesuai ketentuan BCA
- o Jangka waktu :
Max 1 tahun

PT Bank Mandiri

(a) Kredit modal Kerja :

Tujuan Penggunaan :

- (1) Pedagang ekspor
- (2) Perdagangan Dalam negeri
- (3) Industri :

Tekstil dan perajutan, Logam dasar, Ban dan bahan karet, Obat-obatan, pengolahan bahan kimia, Makanan dan Minuman, Film, Plastik, Kayu dan Pengolahannya, Kertas, Bahan bangunan, Crum rubber dan remling, Kayu lapis, Kapur, Pakan ternak, Pengolahan hasil tambang.

- (4) Perkehanan, kehutanan, peternakan dan perikanan
- (5) Prasarana dan jasa

- Jangka waktu kredit :

Jangka waktu kredit sesuai dengan jenis dan sifat kredit, umumnya max 12 bulan

- Plafon :

Disesuaikan dengan kebutuhan proyek yang akan dibiayai

- Suku bunga

Tingkat bunga kredit komersial, sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri

(b) Kredit Investasi

- (1) Tujuan penggunaan :

Untuk membiayai pengadaan barang modal

- (2) Jangka waktu dan tenggang waktu kredit



- Termasuk didalamnya masa tenggang yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan membayar kembali atas dasar cash flow proyek
- Masa tanggung waktu (Grace Period) adalah periode waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank kepada debitur, untuk penangguhan angsuran pokok kredit atau pembayaran bunga atau angsuran pokok beserta bunga sesuai dengan perjanjian kredit s/d waktu tertentu.
- Availability period : masa/periode dalam waktu tertentu dimana limit seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila tidak/belum menarik limit seluruhnya, maka terhadap sisa plafon kredit (yang belum ditarik/unused portion) akan dibatalkan (cancel)
- Plafon kredit
Disesuaikan dengan kebutuhan biaya proyek yang akan dibiayai
- Bunga kredit
Tingkat bunga kredit komersial, sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri

(c) Kredit Usaha Kecil

(1) Tujuan penggunaan :

Untuk membantu permodalan baik dalam bentuk KI dan atau KMK yang diberikan kepada debitur usaha kecil dengan limit max Rp 350 juta (dalam Rp dan Va) untuk usaha produktif.

(2) Jangka waktu kredit

- Jangka waktu KI, KUK max 10 tahun dengan grace periode max 2 tahun
- Jangka waktu KMK, KUK konstruksi sesuai jangn waktu penyelesaian proyek.



(3) **Plafon kredit**

Disesuaikan dengan proyek yang akan dibiayai, plafon kredit antara Rp 350 juta s/d Rp 25 milyar

(4) **Bunga kredit**

Tingkat bunga kredit komersial, sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri.

(d) **Trade Finance**

(1) **Tujuan Trade Finance :**

- Memberikan fasilitas perundangan pembayaran impor (import finance) serta jaminan pembayaran hasil ekspor kepada nasabah untuk kebutuhan modal kerja perusahaan.
- Sebagai sarana untuk membalancar ekspor-impor dan menunjang peningkatan ekspor.

(2) **Jenis Kredit Trade Finance :**

- Trade Finance Cash Loan
- Trade Finance Non Cash Loan

(3) **Jangka waktu :**

Jangka waktu kredit max 1 tahun (umumnya 6 bulan). Jangka waktu per transaksi

(4) **Suku bunga :**

- Penentuan suku bunga kredit didasarkan kepada tingkat bunga pasar menurut jenis, sifat dan jangka waktu kredit
- Tingkat bunga kredit komersial, sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri

PT Bank BUKOPIN

(a) **SWAMITRA**

- > **Plafon** : Rp 1 juta s/d 50 juta
- > **Jangka waktu** : 1 thn - 3 thn
- > **Kegunaan** : Untuk modal kerja usaha



- Tingkat bunga : 30 % per thn (dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar)

(b) Kredit Usaha Kecil (Small Scale Credit)

- Plafon : Rp 50 juta s/d Rp 1 milyar
- Kegunaan : Untuk semua usaha
- Tingkat bunga : 19% - 21% per tahun (dapat berubah sesuai kondisi pasar)

(c) Kredit bisnis agrolenris

- Plafon : Diatas Rp 1 milyar s/d OMPK Pank bukopin
- Kegunaan : Untuk usaha dalam bidang yang terkait dengan pertanian
- Tingkat bunga : 19% - 21% pertahun (dapat berubah sesuai kondisi pasar)

2. Non Perbankan

a. Kamitraan BUMN :

Program kamitraan BUMN dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

o Besarnya dana :

Besarnya dana pembinaan adalah lebih besar dari 1% dan max 3% setelah mempertimbangkan likuiditas perusahaan.

o Suku bunga pinjaman :

- Tingkat bunga diberlakukan menurun (sliding) dan ditetapkan oleh Direksi BUMN lebih rendah dari tingkat bunga Kredit komersial perbankan dengan memperhatikan kelayakan usaha mitra binaan,
- Suku bahga cekisar 6% per tahun untuk pinjaman sampai Rp 50 juta dan untuk pinjaman di atas Rp 50 juta suku bunga sebesar 6-12%. Suku bunga pinjaman max 12% per tahun bangan system perhitungan bunga efektif
- Pinjaman diatas Rp 100 juta harus dikoordinasikan ke PUKK Pusat.



• **Jangka Waktu pinjaman :**

Jangka waktu pinjaman untuk jenis usaha yang sama agar dibahas antara BUMN Koordinator dengan BUMN Pembina untuk diperoleh kesepakatan agar tidak terjadi perbedaan jangka waktu pinjaman.

o **Bidang usaha yang didanai :**

Pertanian, perikanan, bungrajinan tradisional, pangan, industri ringan, perdagangan, jasa dan sektor informal.

b. **Asuransi Pertanian**

(1) **Asuransi Pertanian :** untuk memberikan proteksi atau penggantian terhadap risiko penurunan hasil baik sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, sebagai akibat serangan hama dan penyakit tanaman, organisme pengganggu tanaman, penyakit hewan dan bencana alam.

(2) **Periode pertanggungan :**

Jangka waktu asuransi (pertanggungan) adalah 1 (satu) kali masa tanam yaitu selama max 6 (enam) bulan (sejak menerima kredit).

c. **Modal Ventura**

(1) **Modal Ventura** adalah suatu jenis pembiayaan berupa penyertaan modal dalam jangka waktu tertentu oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) baik perorangan, kelompok, maupun usaha berbadan hukum dengan pola pembagian keuntungan yang akan ditentukan bersama oleh PMV dan PPU.

(2) **Besar penyertaan modal ventura (PMV) kepada PPU Agribisnis :**

- > Pada saat ini jumlah penyertaan modal ventura yang dapat disediakan oleh PMV daerah max Rp 100.000.000,-
- > Untuk penyertaan modal Ventura diatas Rp 100.000.000,- PMV daerah akan mengadakan kerjasama dengan PT. Bahana Artha Ventura Jakarta.
- > Modal Ventura yang didanai oleh PT Bahana Artha Ventura min Rp 100.000.000,-



- Kebutuhan dana tersebut diperuntukkan min 50% untuk investasi dan sisanya untuk modal kerja, apabila kebutuhan investasi kurang dari 50% maka asset dapat di refinancing.
- Jangka waktu Kerja sama :
Jangka waktu kerja sama antara PMV dengan PPU Agribisnis biasanya antara 3-6 tahun.
- Jenis usaha yang dapat dibiayai dengan modal ventura :
 - ✓ Modal kerja seperti pupuk, benih, bibit tanaman obat-obatan, dll.
 - ✓ Modal investasi seperti peralatan, dll.

B) Syarat

Perbankan syariah dapat melayani berbagai jenis pembiayaan untuk berbagai keperluan, dari kebutuhan konsumtif sampai dengan modal kerja usaha, maupun modal investasi bahkan ekspor-impor.

Jenis-jenis pembiayaan itu antara lain:

- Murabah : Jual beli dengan pembayaran lunas/angsuran.
- Salam : Jual beli dengan penyerahan yang ditangguhkan.
- Isthisna : Jual beli dengan pesanan.
- Mudharabah : Bagi hasil/investasi usaha.
- Musyarakah : Usaha bersama/karjasama modal.
- Ijara : Sewa atau leasing.

C) Penjaminan/pendampingan

Program SKJM Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

- a. Tujuan : Untuk peningkatan ketahanan pangan nasional dan sekaligus peningkatan pendapatan petani dan peternak, melalui penyediaan kredit investasi dan atau modal kerja Pangan tingkat panga yang terjangkau.
- b. Ketentuan Pokok Kredit Ketahanan pangan (KKP):
 - Usaha dan Komoditi yang dibiayai KKP
KKP untuk membiayai (1) petani, dalam rangka intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar dan pengembangan hudi daya bebu, (2) peternakan, dalam



rangka peternakan sapi potong, sapi perah, ayam buras, ayam ras, dan itik (3) petani ikan, dalam rangka budidaya ikan dan atau bersama-sama dengan usaha budidaya peternakan ayam buras dan (4) pengadaan pangan padi, jagung dan kedelai.

- Suku bunga KKP adalah suku bunga pasar (komersial) yang berlaku pada Bank Pelaksana yang bersangkutan dikurangi subsidi bunga yang diberikan pemerintah.

TABEL 3 : PERKEMBANGAN SUKU BUNGA KKP

Lampiran 1 Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan (RKAKM) Tahun 2005 Periode 1 November 2005		
1. Lending Rate	18%	18%
2. Subsidi Bunga :		
▪ Tanaman Pangan	9%	9%
▪ Peternakan	5%	6%
▪ Perkebunan	5%	6%
▪ Pengadaan Pangan	5%	6%
▪ Perikanan	5%	6%
3. Suku Bunga KKP		
▪ Tanaman Pangan	9%	9%
▪ Peternakan	5%	6%
▪ Perkebunan	5%	6%
▪ Pengadaan Pangan	5%	6%
▪ Perikanan	5%	6%

Sumber : Pusat Pembayasan Pertanian – Sekretariat Jenderal



TABEL 4 : REALISASI PENYALURAN KREDIT

1	Nanggroe Aceh Darussalam	0
2	Sumatera Utara	927
3	Sumatera Barat	2.108
4	Riau	495
5	Jambi	0
6	Sumatera Selatan	3.524
7	Bengkulu	1.440
8	Lampung	75.526
9	D.K.I. Jaya	0
10	Jawa Barat	46.940
11	Jawa Tengah	14.307
12	D.I. Yogyakarta	7.525
13	Jawa Timur	25.824
14	Bali	106.376
15	Nusa Tenggara Barat	2.977
16	Nusa Tenggara Timur	213
17	Kalimantan Barat	1.283
18	Kalimantan Tengah	4.471
19	Kalimantan Selatan	2.546
20	Kalimantan Timur	1.575
21	Sulawesi Utara	0
22	Sulawesi Tengah	0
23	Sulawesi Selatan	1.319
24	Sulawesi Tenggara	185
25	Maluku	60
26	Papua	972
	Indonesia	302.693

Sumber : Pusat Pembayaran Pertanian - Sekretariat Jenderal



BAB VIII

PETA POTENSI PRODUKSI DAN KONSUMSI

Ulihat dari segi potensi, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk berperan dalam agribisnis dunia. Pada sektor peternakan, terdapat sekitar 1,4 juta ha areal lahan, tersebar di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi, yang sangat cocok bagi penanaman investasi di bidang peternakan. Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian untuk meningkatkan produksi, pendapatan dan taraf hidup petani, mempaluas kesempatan kerja/berusaha, serta meningkatkan pemanfaatan pan paulauan pasar baik pasar domestik maupun ekspor.

TABEL 5 : POPULASI SAPI POTONG MENURUT PROPINSI

1	Nanggroe Aceh Darussalam	880.926	701.356	701.777	655.811	657.188
2	Sumatera Utara	248.078	248.375	243.673	248.971	249.289
3	Sumatera Barat	501.358	548.864	583.860	587.294	611.080
4	Riau	107.648	109.248	112.601	107.854	114.864
5	Jambi	138.388	142.550	145.845	147.817	150.017
6	Sumatera Selatan	415.743	418.000	419.897	438.688	480.073
7	Bengkulu	76.688	78.838	77.983	80.371	82.038
8	Lampung	373.534	380.687	387.350	391.646	394.505
9	D.K.I. Jakarta	-	-	-	-	-
10	Jawa Barat	188.518	189.518	223.618	232.848	248.882
11	Jawa Tengah	1.331.103	1.337.268	1.345.163	1.367.126	1.370.320
12	D.I. Yogyakarta	211.888	217.488	224.247	238.726	239.083
13	Jawa Timur II	3.312.016	3.312.015	2.518.777	2.519.030	2.519.534
14	Bali	521.284	523.870	539.781	576.588	576.588
15	Nusa Tenggara Barat	395.751	403.888	419.588	428.033	434.854
16	Nusa Tenggara Timur	486.051	502.588	512.588	522.528	531.617
17	Kalimantan Barat	144.538	157.040	168.303	156.588	159.580
18	Kalimantan Tengah	39.544	48.055	42.088	93.538	55.588
19	Kalimantan Selatan	146.763	153.447	168.449	173.648	181.132

20	Kalimantan Timur	53.511	56.167	55.145	60.784	62.000
21	Sulawesi Utara	132.514	134.394	124.262	98.741	100.123
22	Sulawesi Tengah	231.489	231.997	194.099	197.692	198.000
23	Sulawesi Selatan	722.452	761.277	737.636	627.961	636.987
24	Sulawesi Tenggara	300.481	300.451	208.227	206.740	210.500
25	Makassar	59.367	60.638	62.727	76.694	78.478
26	Papua	72.248	76.691	70.089	74.296	76.729
27	Bangka Belitung	4.167	4.663	15.497	3.161	3.276
28	Banten	9.236	8.487	9.938	22.872	19.416
29	Gorontalo	169.334	163.747	174.480	201.676	213.660
30	Maluku Utara	44.091	46.449	33.761	34.094	35.735
	Indonesia	11.137.791	11.297.620	10.504.128	10.832.809	10.679.504

Pada tabel 5 kalinatan penyebaran populasi ternak sapi potong di Indonesia hampir meliputi seluruh provinsi yang ada di wilayah tersebut dimana populasi tersebut terbesar di pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah (3.900.000 ekor sapi) yang berarti hampir 37 % dari populasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya peta potensi produksi ternak sapi potong diikuti oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, NTB, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

TABEL 6 : PRODUKSI DAGING SAPI MENURUT PROPINSI

1	Nanggroe Aceh Darussalam	6.065	6.306	6.488	6.636	6.600	2,49
2	Sumatera Utara	6.627	6.836	6.804	6.662	7.074	1,32
3	Sumatera Barat	10.621	10.086	12.142	13.544	13.691	2,56
4	Riau	2.660	4.495	4.546	3.754	3.870	3,09
5	Jambi	3.692	2.332	3.729	2.684	3.028	5,03
6	Sumatera Selatan	9.750	9.970	9.623	8.704	9.130	5,58
7	Bengkulu	1.540	1.692	17.488	1.633	1.762	7,29
8	Lampung	4.697	5.266	6.536	6.768	6.868	1,82
9	DKI Jakarta	14.828	13.719	16.610	13.045	13.698	5,01



10	Jawa Barat	70.933	65.199	74.898	79.029	62.088	3,67
11	Jawa Tengah	55.405	57.181	62.464	65.106	66.451	2,07
12	DI Yogyakarta	4.786	4.885	5.070	5.846	5.917	1,01
13	Jawa Timur	78.119	71.550	77.358	78.068	80.711	3,35
14	Bali	8.607	7.500	6.117	6.887	6.887	0,00
15	Nusa Tenggara Barat	5.058	5.405	5.042	6.252	6.965	5,01
16	Nusa Tenggara Timur	2.451	2.782	2.848	3.610	3.671	1,69
17	Kalimantan Barat	3.126	3.778	3.926	4.324	6.833	58,02
18	Kalimantan Tengah	1.656	1.514	2.060	2.871	3.038	2,28
19	Kalimantan Selatan	3.662	3.978	4.598	5.882	8.705	47,99
20	Kalimantan Timur	6.332	7.365	8.459	6.803	6.940	2,01
21	Sulawesi Utara	2.452	3.730	2.794	3.861	3.915	1,40
22	Sulawesi Tengah	3.237	3.073	2.573	2.499	2.551	2,05
23	Sulawesi Selatan	10.830	11.579	10.567	12.169	12.162	0,11
24	Sulawesi Tenggara	4.417	3.964	4.083	4.874	4.721	1,01
25	Maluku	1.382	1.362	1.451	1.459	1.476	1,17
26	Papua	1.753	2.172	1.810	2.871	2.525	21,02
27	Bangka Belitung	29	1.042	877	1.269	1.262	1,02
28	Banten	9.117	9.345	4.311	15.926	16.246	2,00
29	Gorontalo	428	505	583	72.113	72.113	0,00
30	Maluku Utara	1.009	1.461	1.167	0	0	0,00
	Indonesia	338.685	330.290	389.711	447.573	485.819	3,63

Sumber : Badan Litbang Pertanian



PENUTUP

Potensi dan peluang investasi sapi potong ini disusun dengan maksud untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan dan membina kawasan agribisnis peternakan sapi potong dan sekaligus merupakan kelengkapan pedoman umum pengembangan kawasan agribisnis berbasis peternakan.

Selain kebutuhan minimal komponen kawasan yang harus ada dalam suatu kawasan peternakan sapi potong baik untuk usaha penggemukan, dalam buku ini diuraikan pula komponen kawasan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan upaya pengembangan dan pembinaannya.

Diharapkan buku ini dapat dipergunakan oleh semua pihak yang terkait dalam pengembangan dan kawasan agribisnis peternakan sapi potong dan apabila dirasakan kurang optimal diharapkan saran dan masukan sebagai bahan penyempurnaan selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Djisoedarmo, S, *Praktikum Teknik dan Pemrograman Sistem Komputer*, Orasi Ilmiah dalam rangka Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991
- ARMONO, *Terapannya Usaha Sapi Keraman*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993
- Departamen Pertanian Republik Indonesia, *Buku Statistik Peternakan*, Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Jakarta 2001
- Adi, PU, Vicent D, dan Ilham N, *The Impact of the Economic Crisis on Indonesia Beef Sector, Challenges and Opportunities*, Center for Agro-Socio-Economic Research, AARD, Bogor-Indonesia, 1993
- Jeeman, G, *Responses of the Livestock Service Delivery and Its Management to the Asian Economic Crisis*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Eschborn, Germany, 2000
- Murtidjo, BA, *Beternak Sapi Potong*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990
- National Research Council, *Nutrient Requirements of Beef Cattle, A Users Guide for NRC Model Application*, NAS Printing and Publishing Office, Washington, 1996
- Paragih, B, *Agriternak Berbasis Peternakan*, Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor, Bogor, 1998
- Milman, AD, H. Hartadi, dkk, *Ilmu Manajemen Ternak Dusen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986



